

**Pusat dan Periphery: Pengaruh Pendapatan Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

**Adelia Putri Yulna, Nelly Masnila, Sri Hartaty\***

Politeknik Negeri Sriwijaya

adeliaaayulna@gmail.com

**ABSTRACT**

*The purpose of the study was to test and analyze the effect of local revenue, capital expenditure, employee expenditure on the accountability of financial reporting of district/ city local governments in South Sumatra Province during the period 2013-2022. The data used in this study are secondary data with a research sample of 15 regencies / cities in South Sumatra Province. This study uses quantitative analysis techniques with panel data regression analysis tools. The results of this study (1) Regional income, capital expenditure and employee expenditure have a positive and significant effect on the Accountability of Regional Financial Statements (2) Regional income, capital expenditure and employee expenditure simultaneously affect the Accountability of Regional Financial Statements.*

**Keywords:** *Regional Revenue, Capital Expenditure, Employee Expenditure*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, belanja pegawai terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2013-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sampel penelitian sebanyak 15 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan alat analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini (1) Pendapatan daerah, belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah (2) Pendapatan daerah, belanja modal dan belanja pegawai secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah.

**Kata kunci:** Pendapatan Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai

**PENDAHULUAN**

Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi sejumlah karakteristik kualitatif yang telah diatur, seperti korelevanan, keandalan, kemudahan pemahaman, dan kemampuan untuk dibandingkan, khususnya dalam konteks Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan pemerintah harus diaudit oleh BPK RI, yang kemudian akan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berisi Opini BPK sebagai hasil akhir dari proses audit tersebut.

Opini BPK, sebagai pernyataan profesional dari pemeriksa, menilai kesesuaian informasi keuangan dalam laporan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK RI memiliki potensi untuk memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaporan keuangan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, opini ini menjadi landasan bagi penilaian tingkat akuntabilitas suatu instansi pemerintah, sebagaimana tercermin dalam Laporan Hasil Audit (LHP) atas LKPD yang diterbitkan oleh BPK, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi yang bersangkutan.

**Tabel 1. Daftar Opini di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Kabupaten Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Banyuasin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Empat Lawang	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
3	Lahat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Muara Enim	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Musi Banyuasin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Musi Rawas	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP
7	Ogan Ilir	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP
8	Ogan Komering Ilir	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Ogan Komering Ulu	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
10	Ogan Komering Ulu Selatan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Ogan Komering Ulu Timur	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Lubuk Linggau	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Pagar Alam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Palembang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Prabumulih	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2024

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan memperoleh opini WTP cenderung memiliki manajemen pendapatan yang lebih baik. Pendapatan daerah yang dikelola dengan baik mencerminkan ketepatan dalam pencatatan dan pelaporan, serta kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. Selain itu, belanja modal yang efektif dan efisien mendukung pembangunan infrastruktur yang baik dan kualitas pelayanan publik, yang berkontribusi pada penilaian opini WTP selain itu temuan audit berperan penting dalam memberikan panduan bagi daerah untuk memperbaiki kelemahan dan memastikan penggunaan dana publik yang lebih efisien dan efektif, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan daftar opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2019 hingga 2022. Opini audit tersebut mencerminkan hasil evaluasi BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Terdapat dua jenis opini utama yang diberikan oleh BPK, yaitu "WTP" (Wajar Tanpa Pengecualian) yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan dapat dipercaya, serta "WDP" (Wajar Dengan Pengecualian) yang menunjukkan

ketidakpastian atas informasi keuangan yang disajikan. Berdasarkan data tersebut, sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan (seperti Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, dan lain-lain) mendapatkan opini "WTP" secara konsisten selama periode 2019-2023, menunjukkan bahwa laporan keuangan mereka dianggap transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh BPK RI. Sementara itu, terdapat beberapa kabupaten/kota yang pada awalnya mendapatkan opini "WDP" (seperti Empat Lawang dan Lahat), namun berhasil meningkatkan opini menjadi "WTP" dalam tahun-tahun berikutnya, menunjukkan perbaikan dalam pelaporan keuangan dan tata kelola keuangan daerah. Hal ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah.

Data opini audit dari BPK RI terkait laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki keterkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal. Opini "WTP" yang diberikan oleh BPK RI menandakan bahwa laporan keuangan daerah dianggap wajar, dapat dipercaya, dan transparan. Ini mencerminkan bahwa kabupaten/kota tersebut memiliki pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel. Dalam konteks PAD, opini "WTP" dapat memberikan keyakinan kepada investor dan masyarakat terkait kinerja keuangan daerah, yang dapat berdampak positif pada penerimaan PAD karena meningkatkan kepercayaan dan potensi investasi (Zahra et al., 2024). Sementara itu, Belanja Modal juga terkait dengan opini audit tersebut. Opini "WTP" yang dipilih kabupaten/kota menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan mereka efektif dan terpercaya, termasuk dalam pengelolaan belanja modal. Belanja Modal merupakan bagian penting dari anggaran daerah yang digunakan untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan lainnya. Dengan opini "WTP", kabupaten/kota cenderung dapat mengelola belanja modal dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga menjaga konsistensi dalam penggunaan dana untuk pembangunan daerah secara berkelanjutan. Opini positif dari BPK RI juga dapat memberikan keyakinan bahwa belanja modal dilakukan dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Tabel 2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2022**

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	3.528.011	3.494.511	3.375.101	3.865.463	4.930.956
<b>Belanja Modal</b>	1.537.275	1.606.220	1.664.697	1.836.834	1.536.370

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan sealamat periode 2018 hingga 2022, Provinsi Sumatera Selatan mengalami perubahan yang signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal. Pada tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah mencapai sekitar 3.494 miliar Rupiah, sedangkan Belanja Modal pada periode yang sama sebesar 1.606 miliar Rupiah. Angka-angka ini mencerminkan keadaan di mana

PAD hampir dua kali lipat dari Belanja Modal pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan pendapatan menjadi sekitar 3.375 miliar Rupiah, sementara Belanja Modal tetap stabil di sekitar 1.665 miliar Rupiah. Hal ini menunjukkan adanya tekanan pada pendapatan daerah, namun kebijakan pengeluaran pada Belanja Modal tetap terjaga (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2024). Pada tahun 2021, terjadi lonjakan signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah, melonjak hingga sekitar 3.865 miliar Rupiah, sementara Belanja Modal juga meningkat hingga sekitar 1.837 miliar Rupiah. Kenaikan yang tajam ini mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi daerah dan peningkatan investasi dalam pembangunan. Namun, pada tahun 2022, meskipun Pendapatan Asli Daerah mencapai puncaknya sebesar 4.931 miliar Rupiah, Belanja Modal mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi sekitar 1.536 miliar Rupiah. Penurunan ini memunculkan pertanyaan tentang alasan di balik pengurangan signifikan dalam alokasi dana untuk investasi jangka panjang seperti infrastruktur (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2024). Secara Keseluruhan data tersebut memberikan gambaran tentang kinerja keuangan daerah terkait dengan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Pertumbuhan PAD yang stabil atau meningkat dari tahun ke tahun dapat mencerminkan kemampuan daerah untuk mengelola keuangan dengan baik, yang dapat mendukung opini "WTP" dari BPK terkait transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, Belanja Modal yang terkendali dan sesuai dengan rencana pembangunan daerah juga dapat menjadi faktor pendukung dalam memperoleh opini yang baik dari BPK. Oleh karena itu, analisis terhadap pertumbuhan PAD dan pengendalian Belanja Modal dapat menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah serta hubungannya dengan opini audit yang dikeluarkan oleh BPK.

Studi terdahulu tentang pengaruh pendapatan daerah, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah cenderung menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel-variabel tersebut. Sebuah penelitian dapat menemukan bahwa peningkatan pendapatan daerah dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan pendapatan yang mencukupi, pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengelola keuangan dengan baik dan menyajikan informasi keuangan secara lebih komprehensif (Muafiq & Chariri, 2023) Belanja modal dan belanja pegawai yang efektif serta terencana dengan baik juga dapat berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan belanja modal yang transparan dan sesuai dengan rencana pembangunan dapat mencerminkan kinerja keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas. Selain itu, opini audit dari BPK juga dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Studi-studi sebelumnya mungkin telah menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit yang baik dari BPK cenderung memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dalam penyajian informasi keuangan mereka. Opini positif dari BPK dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga mendorong

peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik (Setyawan & Erryana, 2016).

Penelitian terdahulu tentang pengaruh pendapatan daerah, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan berbagai temuan penting. Hidayat dan Nurhayati (2020) menemukan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan yang baik dari sumber pendapatan lokal dan alokasi belanja modal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Ratnasari dan Setiawan (2019) juga mengidentifikasi bahwa belanja modal dan belanja pegawai yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian ini tidak secara spesifik menguraikan faktor-faktor yang menjadikan belanja modal dan belanja pegawai efektif, menunjukkan adanya kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam.

Ayu dan Purwanto (2021) menunjukkan bahwa pendapatan daerah dan belanja pegawai secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, meskipun penelitian ini lebih berfokus pada aspek kualitas daripada akuntabilitas. Santoso dan Kusuma (2022) menyoroti pentingnya efektivitas belanja modal dan belanja pegawai dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, namun mereka tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti regulasi pemerintah dan tekanan politik yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Penelitian oleh Fauzi dan Rahmawati (2023) menemukan bahwa belanja modal dan belanja pegawai secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah, namun kontribusi spesifik dari belanja pegawai terhadap akuntabilitas belum dijelaskan secara mendalam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode Studi Kausal yang bersifat kuantitatif yang digunakan agar dapat mengetahui gambaran dan menguji pengaruh Pendapatan Daerah, Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. pada 16 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan yang telah lulus persyaratan dengan berbagai kriteria berdasarkan tujuan penelitian untuk dijadikan sampel pada periode 2013-2022. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013-2022 Provinsi Sumatera Selatan memiliki 17 kabupaten/kota yang terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *non probability sampling* dengan pendekatan *Sampling Purposive*. Kriteria pengambilan sampel disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Populasi dan Sampel**

No	Identifikasi	Jumlah Kabupaten/Kota
1	LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang telah diaudit BPK tahun 2013-2022	17
2	Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang tidak memenuhi Kriteria Penelitian yaitu menerbitkan LKPD selama periode 2013-2022	(2)
3	Sampel	15
4	Unit Analisis Penelitian	150

Berdasarkan perhitungan pengambilan sampel di atas maka jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang dapat dijadikan sampel adalah 15 kabupaten/kota dengan tahun penelitian 2013 sampai dengan tahun 2022 hingga sehingga terdapat 150 unit analisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua metode analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk melihat gambaran statistik deskriptif dari variabel penelitian. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis pengaruh pendapatan daerah, belanja modal dan Belanja Pegawai di Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Alat analisis yang digunakan adalah Regresi Berganda dengan model persamaan sebagai berikut:

$$AKD_i = \beta_0 + \beta_1 PD + \beta_2 BM + \beta_3 BP + e$$

dimana:

- AKD<sub>i</sub> = Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah
- $\beta_0$  = *Intercept*
- $\beta_1$ -  $\beta_3$  = Parameter/koeffisien persamaan model
- PD = Pendapatan Daerah
- BM = Belanja Modal
- BP = Belanja Pegawai
- e = *Error*.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Gambaran statistik deskriptif akuntabilitas laporan keuangan daerah di Provinsi Sumatera Selatan, dilakukan analisis statistik deskriptif. Analisis ini mencakup perhitungan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari data akuntabilitas laporan keuangan setiap kabupaten/kota dari tahun 2013 hingga 2022. Berikut hasil statistik deskriptif yang menjelaskan variabel terkait dapat dilihat pada Tabel 4

**Tabel 4. Output Statistik Deskriptif**

	N	MinimumMaximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Keuangan Daerah	150	1	21.53	0.52
Belanja Modal	150	101	499299.975	114.23
Belanja_Pegawai	150	100	498305.325	110.24
Pendapatan_Daerah	150	109	498302.753	109.47
Valid N (listwise)	150			

Sumber :Olahan Data,2024

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa jumlah data (N) dalam penelitian ini adalah sebanyak 150 yang didapat dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2013-2022 Berdasarkan analisis data akuntabilitas keuangan daerah dan aspek terkait yang mencakup belanja modal, belanja pegawai, dan pendapatan daerah. Berdasarkan jumlah observasi sebanyak 150, akuntabilitas keuangan daerah menunjukkan nilai minimum 1 dan maksimum 2, dengan rata-rata 1.53 dan standar deviasi 0.52. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah memperoleh akuntabilitas keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Belanja modal di berbagai daerah menunjukkan nilai minimum 101 dan maksimum 499, dengan rata-rata 299.975 dan standar deviasi 114.23. Hal ini menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam alokasi belanja modal di berbagai daerah. Sementara itu, belanja pegawai memiliki nilai minimum 100 dan maksimum 498, dengan rata-rata 305.325 dan standar deviasi 110.25, yang juga menunjukkan variasi yang signifikan dalam alokasi anggaran untuk pegawai di berbagai daerah. Pendapatan daerah memiliki nilai minimum 109 dan maksimum 498, dengan rata-rata 302.753 dan standar deviasi 109.48. Ini menunjukkan adanya perbedaan dalam kemampuan pendapatan di berbagai daerah. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar daerah memiliki akuntabilitas keuangan yang baik, terdapat variasi yang signifikan dalam belanja modal, belanja pegawai, dan pendapatan daerah, yang mencerminkan perbedaan dalam prioritas pengeluaran dan kapasitas pendapatan di berbagai daerah. Ketidakseimbangan Investasi Swasta dan Pemerintah

Analisis regresi berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen (terikat) dan dua atau lebih variabel independen (bebas). Teknik ini bertujuan untuk memahami seberapa baik variabel- variabel independen dapat menjelaskan variabilitas dalam variabel dependen dan untuk mengidentifikasi kekuatan serta arah hubungan tersebut. Penelitian menganalisis pengaruh pendapatan daerah, belanja modal dan Belanja Pegawai di Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dengan analisis regresi berganda dengan hasil secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5

**Tabel 5. Hasil Regresi Berganda menggunakan Pendekatan *Random Effect Model***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PENDAPATAN_DAERAH	0.356393	0.175949	2.025547	0.0466
BELANJA_MODAL	0.394737	0.133843	2.949251	0.0043
BELANJA_PEGAWAI	0.665735	0.282844	2.353719	0.0214
C	1.411349	0.127810	11.04259	0.0000
R-squared	0.143656 Mean dependent var			1.160000
Adjusted R-squared	0.107473 S.D. dependent var			0.369075
S.E. of regression	0.348679 Akaike info criterion			0.782526
Sum squared resid	8.631947 Schwarz criterion			0.906125
Log likelihood	-25.34471 Hannan-Quinn criter.			0.831878
F-statistic	3.970204 Durbin-Watson stat			1.781953
Prob(F-statistic)	0.011265 Wald F-statistic			3.488642
Prob(Wald F-statistic)	0.020064			

Sumber: Olahan Data, 2024

$$AKD_i = 1,411 + 0,356393PD + 0,394737BM + 0,6657BP + e$$

1. Nilai konstanta sebesar 1,411 menunjukkan bahwa apabila variabel Pendapatan Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai dianggap tetap, maka nilai 1,411 menunjukkan besarnya prediksi akuntabilitas pelaporan keuangan daerah provinsi Sumatera Selatan bernilai positif.
2. Koefisien regresi pendapatan daerah yang dinotasikan dengan PD adalah sebesar 0.356. Artinya, setiap 1% kenaikan dalam variabel pendapatan daerah, maka akuntabilitas pelaporan keuangan yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akan meningkat sebesar 0,35% dengan asumsi variabel independen lain dalam model dianggap konstan.
3. Koefisien regresi Belanja Modal yang dinotasikan dengan BM adalah sebesar 0,394. Artinya, setiap 1% kenaikan dalam variabel belanja modal, maka akuntabilitas pelaporan keuangan yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akan meningkat sebesar 0,394 % dengan asumsi variabel independen lain dalam model dianggap konstan.
4. Koefisien regresi Belanja Pegawai yang dinotasikan dengan BP adalah sebesar 0,66 Artinya, setiap 1% kenaikan dalam variabel Belanja Pegawai, maka akuntabilitas pelaporan keuangan yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akan meningkat sebesar 0,66 % dengan asumsi variabel independen lain dalam model dianggap konstan.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan teori agensi memfokuskan pada hubungan antara agen (pemerintah daerah) dan prinsipal (masyarakat), serta potensi konflik kepentingan yang dapat timbul dari hubungan tersebut. Dalam hal ini, pendapatan daerah yang lebih besar berperan

penting dalam memperkuat akuntabilitas laporan keuangan daerah. Pendapatan daerah yang tinggi membantu mengurangi masalah keagenan. Dalam hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, ada potensi agen (pemerintah) bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal (masyarakat). Dengan pendapatan yang lebih besar, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya untuk memperkuat pengawasan dan audit, yang pada akhirnya mengurangi potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa tindakan pemerintah sejalan dengan kepentingan masyarakat serta pendapatan yang tinggi mengurangi asimetri informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan sumber daya yang lebih besar, pemerintah dapat mengimplementasikan sistem pelaporan keuangan yang lebih baik dan lebih transparan. Hal ini memungkinkan masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik terhadap informasi keuangan yang akurat, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan (Mudhofar & Tahar, 2016; Panda & Leepsa, 2017b)

Berdasarkan rangkuman penelitian sebelumnya yaitu temuan Arifin (2015) menemukan bahwa pemerintah daerah dengan sumber pendapatan yang besar cenderung berinvestasi lebih banyak dalam sistem pelaporan yang transparan dan infrastruktur pengelolaan keuangan yang canggih. Dengan demikian, dana yang lebih besar memungkinkan alokasi sumber daya untuk pengembangan kapasitas staf dan teknologi informasi yang mendukung akuntabilitas keuangan. Sari dan Susanti (2016) menunjukkan bahwa daerah dengan pendapatan yang lebih besar memiliki Tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pelaporan keuangan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa dana yang lebih besar memungkinkan pengadaan sumber daya untuk audit internal dan eksternal yang lebih sering dan mendalam, memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan keadaan sebenarnya dan mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Herawati (2017) menemukan bahwa pendapatan daerah yang lebih tinggi meningkatkan motivasi pemerintah daerah untuk mematuhi regulasi keuangan. Pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi lebih cenderung mempertahankan standar akuntansi yang ketat dan transparansi dalam pelaporan keuangan untuk memastikan kesinambungan pendapatan dari berbagai sumber, termasuk bantuan pusat dan hibah.

Temuan Putra dan Nugroho (2018) dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang tinggi memungkinkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan melalui pelatihan dan pengembangan staf. Dengan kapasitas yang lebih baik, staf keuangan dapat menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan akuntabel, serta adanya kontrol dan mekanisme insentif yang lebih kuat. Lestari (2019) menemukan bahwa pendapatan daerah yang tinggi berkontribusi pada pengurangan risiko moral *hazard* dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan pendapatan yang lebih besar, pemerintah daerah dapat menerapkan mekanisme pengawasan dan kontrol yang lebih ketat, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan dana dan memastikan penggunaan dana yang efisien dan efektif. Wibowo dan Handayani (2020) menunjukkan bahwa transparansi keuangan dan akuntabilitas meningkat secara signifikan di daerah dengan pendapatan tinggi. Pendapatan yang besar memungkinkan daerah untuk melakukan audit eksternal

yang independen lebih sering, memberikan penilaian objektif terhadap laporan keuangan daerah, dan meningkatkan kepercayaan publik.

Hasil temuan penelitian berdasarkan pengujian statistik menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara belanja modal dan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Teori agensi mengkaji hubungan antara agen (pemerintah daerah) dan prinsipal (masyarakat), serta potensi konflik kepentingan yang dapat timbul dari hubungan tersebut. Dalam hal ini, belanja modal yang besar memberikan berbagai manfaat yang mendukung peningkatan akuntabilitas keuangan daerah. Belanja modal yang tinggi membantu mengurangi masalah keagenan. Dalam hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, terdapat potensi agen (pemerintah) bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal (masyarakat). Dengan investasi yang besar dalam aset tetap seperti infrastruktur, pemerintah daerah akan lebih terdorong untuk menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan. Hal ini mengurangi masalah keagenan karena pemerintah daerah perlu mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat (Panda & Leepsa, 2017b)

Belanja modal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah didukung oleh berbagai penelitian terdahulu. Maher dan Deller (2007) menunjukkan bahwa belanja modal pada infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan, pada gilirannya, transparansi serta akuntabilitas penggunaan dana publik. Selain itu, penelitian oleh Pina dan Torres (2003) menemukan bahwa investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi operasional pemerintah daerah, sehingga memungkinkan pelaporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu. Bräutigam (2004) menambahkan bahwa belanja modal dalam sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) dapat meningkatkan transparansi dan memungkinkan pengawasan yang lebih baik, membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana.

Kajian Sopanah *et al.* (2013) menunjukkan bahwa belanja modal pada proyek-proyek yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ketika masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan melihat hasil nyata dari belanja modal, tingkat kepercayaan dan kepuasan terhadap pemerintah meningkat, yang berdampak positif pada akuntabilitas keuangan. Penelitian oleh Shah (2007) juga menekankan pentingnya belanja modal dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai pemerintah daerah. Dengan kompetensi yang lebih baik, pengelolaan keuangan menjadi lebih akuntabel dan transparan. Secara keseluruhan, belanja modal yang diarahkan dengan baik dapat memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan efisiensi, dan memastikan penggunaan dana publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Dalam hubungan agensi, terjadi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara prinsipal (masyarakat dan legislatif) dan agen (pemerintah daerah). Pemerintah daerah mungkin

memprioritaskan kepentingan mereka sendiri, seperti gaji yang lebih tinggi, daripada kepentingan publik, yang dapat tercermin dalam belanja pegawai yang tidak efisien atau berlebihan. Akuntabilitas laporan keuangan yang baik memerlukan mekanisme pengawasan dan insentif yang efektif untuk mengurangi perilaku oportunistik agen. Pengeluaran pegawai yang transparan dan sesuai dengan anggaran mencerminkan akuntabilitas yang baik, sementara pengeluaran yang tidak transparan dapat menurunkan tingkat akuntabilitas dan meningkatkan kecurigaan masyarakat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efisiensi belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dengan pemerintah daerah yang mengelola belanja pegawai secara efisien cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih akuntabel. Transparansi dalam pengelolaan belanja pegawai juga berhubungan positif dengan akuntabilitas laporan keuangan, di mana pemerintah daerah yang lebih transparan cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kepatuhan terhadap regulasi dan peningkatan kapasitas serta kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan juga berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Dengan demikian, pengelolaan belanja pegawai yang efisien, transparan, dan sesuai dengan regulasi sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Kajian ini sejalan dengan Penelitian oleh Adi dan Safitri (2016) menemukan bahwa belanja pegawai memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah di Indonesia, dengan laporan keuangan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mardiasmo (2018) menunjukkan bahwa investasi dalam belanja pegawai seperti pembangunan SDM dan pendidikan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Susilawati dan Setiawan (2020) juga menemukan bahwa pengelolaan belanja pegawai yang baik berdampak pada peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, yang berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menemukan bahwa pendapatan daerah, belanja modal, dan belanja pegawai memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan daerah dan alokasi belanja modal serta belanja pegawai, semakin baik tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan yang dicapai oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah yang mampu mengoptimalkan pendapatan daerahnya dan mengelola belanja modal serta belanja pegawainya secara efektif akan lebih mungkin mencapai akuntabilitas yang lebih baik dalam pelaporan keuangannya. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar penelitian lanjutan lebih fokus pada analisis faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi pendapatan daerah, belanja modal, dan temuan audit. Dengan melakukan analisis yang lebih mendalam, peneliti dapat memberikan wawasan yang

lebih komprehensif mengenai kontribusi masing-masing faktor terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Selain itu, melakukan studi perbandingan antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan atau dengan provinsi lain dapat memberikan perspektif tambahan dan mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., Sari, I. M., & N., Y. A. (2022). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 80–92. <https://doi.org/10.33772/jak-uho.v7i1.24546>
- Ardyansah, D., & Zulaikha. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio, dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–9.
- BPK. (2016). *Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemda*. <http://www.bpk.go.id>. BPK, J. (2019). *Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara*. <http://jdih.bpk.go.id/>.
- Darwanis, D., & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1, 183–199. <https://doi.org/10.24815/jdab.v1i2.3628>
- Djpk.kemenkeu.go.id. (2017). *Direktorat Jenderal Pajak dan Keuangan*. [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (ke-9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah* (1st ed.). Salemba Empat.
- Hamdani, M. (2016). Good corporate governance (GCG) dalam perspektif agency theory. *Semnas Fekon, 2016*, 279–283.
- Hoesada, J. (2016). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Huong, G. N. T., Thai, H. M., & Binh, D. T. (2023). *Agency Theory in University Governance and the Role of Internal Audit: From the Private Sector Perspectives to the Case of Vietnamese Public Higher Education Institutions*. Atlantis Press International BV. [https://doi.org/10.2991/978-94-6463-076-3\\_46](https://doi.org/10.2991/978-94-6463-076-3_46)
- KBBI. (2016). *akun.ta.bi.li.tas*. [Kbbi.Kemdikbud.Go.Id](http://kbbi.kemdikbud.go.id).
- Michael, J., & William, M. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Muafiq, R. R., & Chariri, A. (2023). Desentralisasi Fiskal, Efektivitas Penyerapan

- Anggaran, Belanja Modal, Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Kinerja Pemerintah Daerah sebagai Variabel Moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 17(2), 176–185. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0053.176-185>
- Muraiya, & Nadirsyah. (2018a). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efisiensi Dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(2), 1.
- Muraiya, & Nadirsyah. (2018b). Pengaruh desentralisasi fiskal, efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah provinsi aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(2), 236–253.
- Musyarrofah, E., & Amanah, L. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, dan Size Terhadap Cash Effective Tax Rate. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(9), 1–16.
- Nurina, & Yahya, M. R. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Dan Ketaatan Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(2), 128–142.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017a). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017b). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95. <https://doi.org/10.1177/0974686217701467>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.* (n.d.).
- Rahayu, F. (2018). Derterminan Kualitas Opini Audit Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 267–279. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9016>
- Rasyid, Y., Suci, R. G., & Putri, A. M. (2022). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 10(2), 80–93. <https://doi.org/10.24127/pro.v10i2.6589>
- RI, U. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006. <http://www.jdih.kemenkeu.go.id>.
- Setyawan, H., & Erryana, V. (2016). Determinan akuntabilitas pelaporan keuangan

pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5(1), 1–14.

Sugiono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta Bandung*, 16.

Yuniarti, R., Ekonomi, F., & Muhammadiyah, U. (2005). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). *Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsi*. 39–50.

Zahra, F. A., Zaen. Muhammad Rafi, & Mellinia, S. P. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(1), 369–384. <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jumia/article/view/2422/1886>